

IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN DALAM PERSPEKTIF TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN MAJENE

Andi Nur Mughni Tanriani¹, Arifin Fajar Putera², Djuanda Nawawi³, Lukman Irwan⁴

^{1,3,4}Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri

Email Korespondensi: mughnitanriani77@gmail.com

ABSTRACT

Sustainable development in the education sector is a key component in improving human resource quality and ensuring equitable access to education. This study aims to analyze the implementation of sustainable education development programs in Majene Regency using David C. Korten's (1980) program implementation model, which emphasizes the alignment between programs, implementing organizations, and target groups. This research employs a qualitative descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving key informants such as local government officials, school principals, teachers, and education supervisors. Data analysis used the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of sustainable education programs in Majene Regency is influenced by three main dimensions. First, in the program people fit dimension, education programs such as educational assistance and infrastructure development generally align with community needs, although additional policies are required to improve access in remote mountainous areas. Second, in the program organization fit dimension, challenges remain in terms of uneven teacher distribution and limited numbers of school supervisors. Third, in the organization environment fit dimension, geographical conditions and community participation significantly affect the effectiveness of program implementation. Therefore, strengthening institutional capacity, improving the distribution of educators, and developing adaptive education policies are necessary to enhance sustainable education development in Majene Regency.

Keywords: Sustainable development, Education policy implementation, Local governance.

ABSTRAK

Pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memastikan pemerataan akses pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan di Kabupaten Majene dengan menggunakan model implementasi program dari David C. Korten (1980) yang menekankan kesesuaian antara program, organisasi pelaksana, dan kelompok sasaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari pejabat pemerintah daerah, kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah. Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program pendidikan berkelanjutan di Kabupaten Majene dipengaruhi oleh tiga dimensi utama. Pertama, pada dimensi *program people fit*, program pendidikan seperti bantuan pendidikan dan pembangunan sarana pendidikan secara umum telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meskipun masih diperlukan kebijakan tambahan untuk meningkatkan akses pendidikan di wilayah terpencil. Kedua, pada dimensi *program organization fit*, masih terdapat kendala terkait distribusi tenaga pendidik yang belum merata serta keterbatasan jumlah pengawas sekolah. Ketiga, pada dimensi *organization environment fit*, kondisi geografis wilayah serta partisipasi masyarakat menjadi

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

488

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program pendidikan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, pemerataan tenaga pendidik, serta pengembangan kebijakan pendidikan yang adaptif terhadap kondisi geografis diperlukan untuk meningkatkan pembangunan pendidikan berkelanjutan di Kabupaten Majene.

Kata kunci: Pembangunan berkelanjutan, Implementasi kebijakan pendidikan, Tata kelola daerah.

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma pembangunan global yang menekankan keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam rangka memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhinya. Paradigma ini diperkuat melalui agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui dokumen *2030 Agenda for Sustainable Development*. Agenda ini menetapkan 17 tujuan pembangunan global yang menjadi kerangka kerja bagi negara-negara di dunia dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu tujuan utama dalam agenda tersebut adalah SDG 4: *Quality Education*, yang menekankan pentingnya menjamin pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas serta mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua (Gunawan, 2025; Yanuarto et al., 2025).

Pendidikan memiliki peran strategis dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan karena pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan kapasitas individu, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mengurangi kesenjangan sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa investasi dalam sektor pendidikan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas sosial di berbagai negara (Pham Xuan, 2025; Bastida et al., 2024).

Secara global pencapaian tujuan pendidikan dalam SDGs masih menghadapi berbagai tantangan. Ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta antara kelompok sosial ekonomi masyarakat masih menjadi persoalan yang signifikan di berbagai negara berkembang. Studi terbaru menunjukkan bahwa integrasi SDG 4 dalam sistem pendidikan nasional masih menghadapi kendala dalam aspek tata kelola pendidikan, ketersediaan sumber daya, serta kesiapan institusi pendidikan dalam mengadopsi kurikulum yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan (Balonier & Huber, 2025; Pham Xuan, 2025). Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi pendidikan berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh kapasitas institusi pemerintah dalam mengelola kebijakan pendidikan. Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan karena mereka berada pada level yang paling dekat dengan masyarakat sebagai penerima manfaat program pendidikan (Djafar, 2025; Kurrohman, 2025).

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, UNESCO mendorong penerapan konsep *Education for Sustainable Development* (ESD) yang bertujuan membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang mendukung pembangunan berkelanjutan. ESD tidak hanya berfokus pada penguasaan pengetahuan akademik, tetapi juga pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kesadaran lingkungan, serta tanggung jawab sosial dalam menghadapi berbagai tantangan global (Pada, 2025; Brooks et al., 2024). Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai keberlanjutan dalam kurikulum pendidikan dapat meningkatkan kesadaran lingkungan serta mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju pola kehidupan yang lebih berkelanjutan. Pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan isu-isu keberlanjutan dalam proses pembelajaran terbukti mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap tantangan global seperti perubahan iklim dan degradasi lingkungan (Duda, 2022; Pada, 2025).

Di Indonesia, komitmen terhadap pelaksanaan SDGs diwujudkan melalui berbagai kebijakan nasional, salah satunya melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kebijakan ini menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan pembangunan nasional maupun daerah. Implementasi SDGs juga diintegrasikan dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Meskipun berbagai kebijakan telah dilaksanakan, pembangunan pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan ketimpangan akses pendidikan antar wilayah. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa meskipun indikator partisipasi pendidikan nasional menunjukkan tren yang positif, kesenjangan kualitas pendidikan masih terjadi antara wilayah perkotaan dan wilayah terpencil serta antara kelompok sosial ekonomi masyarakat (Widiastuti, 2025).

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan pendidikan tidak hanya bergantung pada kebijakan nasional, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program pendidikan. Kabupaten Majene sebagai salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Barat juga memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Komitmen tersebut tercermin dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majene, yang menempatkan peningkatan kualitas pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.

Namun implementasi pembangunan pendidikan di Kabupaten Majene masih menghadapi berbagai tantangan. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene (2024) menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah usia 7-12 tahun berada pada kisaran 97 persen, sedangkan APS usia 13-15 tahun berada pada kisaran 92 persen. Meskipun angka tersebut relatif tinggi, masih terdapat kesenjangan akses pendidikan antar wilayah, terutama antara wilayah pesisir dan wilayah pegunungan. Selain itu distribusi tenaga pendidik yang belum merata serta keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan di beberapa wilayah juga menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kondisi geografis Kabupaten Majene yang terdiri dari wilayah pesisir, dataran, dan pegunungan juga mempengaruhi pemerataan akses pendidikan.

Berdasarkan berbagai kondisi tersebut dapat dilihat bahwa, meskipun berbagai program pendidikan telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, implementasi pembangunan pendidikan berkelanjutan masih menghadapi berbagai kendala. Research gap dalam penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang secara khusus menganalisis implementasi pembangunan pendidikan berkelanjutan di tingkat pemerintah daerah dengan menggunakan pendekatan teori implementasi program. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menekankan pada evaluasi kebijakan pendidikan secara umum, sementara kajian yang mengkaji implementasi pembangunan pendidikan berkelanjutan dalam perspektif tata kelola pemerintahan daerah masih relatif terbatas. Oleh karena itu bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan di Kabupaten Majene dengan menggunakan pendekatan model implementasi program dari David C. Korten, yang menekankan pentingnya kesesuaian antara program, organisasi pelaksana, dan kelompok sasaran dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu program pembangunan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis implementasi program pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan di Kabupaten Majene. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses pelaksanaan program pendidikan serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dengan fokus pada instansi yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan, seperti Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta beberapa satuan pendidikan. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yang

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

490

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



meliputi pejabat pemerintah daerah, kepala sekolah, guru, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program pendidikan.

Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan pemerintah daerah, serta data statistik pendidikan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan metode.

PEMBAHASAN

Kondisi Pendidikan dan Akses Pendidikan di Kabupaten Majene

Akses pendidikan merupakan salah satu indikator utama dalam pembangunan pendidikan berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan ke-4, yaitu menjamin pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas bagi semua. Pendidikan yang inklusif dan merata merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi ketimpangan sosial dalam masyarakat (UNESCO, 2021; OECD, 2023). Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, peningkatan akses pendidikan tidak hanya berkaitan dengan perluasan layanan pendidikan, tetapi juga dengan pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh kelompok masyarakat tanpa memandang kondisi geografis maupun sosial ekonomi (Leal Filho et al., 2022). Dalam konteks Kabupaten Majene, akses pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama kondisi geografis wilayah, distribusi fasilitas pendidikan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa wilayah dengan karakteristik geografis yang kompleks cenderung menghadapi tantangan lebih besar dalam pemerataan layanan pendidikan dibandingkan wilayah perkotaan yang memiliki akses infrastruktur yang lebih baik (Donnelly & Patrinos, 2021; World Bank, 2022).

Kabupaten Majene memiliki karakteristik geografis yang beragam, terdiri dari wilayah pesisir, dataran, dan pegunungan. Kondisi ini menyebabkan adanya perbedaan tingkat keterjangkauan layanan pendidikan antar wilayah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene, angka partisipasi sekolah pada kelompok usia 7-12 tahun menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, yaitu dari 96,16 persen pada tahun 2016 menjadi 97,27 persen pada tahun 2023. Sementara itu, angka partisipasi sekolah pada kelompok usia 13-15 tahun berada pada kisaran 90-93 persen dalam periode yang sama. Data ini menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar di Kabupaten Majene relatif tinggi, meskipun masih terdapat fluktuasi pada beberapa tahun tertentu.

Temuan ini sejalan dengan laporan UNESCO Global Education Monitoring Report (2023) yang menyatakan bahwa peningkatan angka partisipasi sekolah merupakan indikator penting dalam keberhasilan pembangunan pendidikan, meskipun capaian tersebut seringkali masih disertai dengan kesenjangan akses pendidikan antar wilayah. Namun demikian, jika dilihat lebih rinci berdasarkan kondisi wilayah, terdapat perbedaan signifikan antara wilayah pesisir, dataran, dan pegunungan. Wilayah pesisir seperti Kecamatan Banggae dan Banggae Timur memiliki tingkat kehadiran siswa yang relatif tinggi, yaitu sekitar 93-95 persen. Hal ini disebabkan oleh akses transportasi yang lebih baik serta ketersediaan fasilitas pendidikan yang relatif memadai. Penelitian oleh OECD (2022) menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur transportasi dan fasilitas pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan partisipasi pendidikan di tingkat daerah. Sebaliknya, wilayah pegunungan seperti Kecamatan Ulumanda dan Tubo Sendana memiliki tingkat kehadiran siswa yang lebih rendah, yaitu sekitar 78-83 persen. Hal ini disebabkan oleh jarak tempuh siswa menuju sekolah yang cukup jauh serta kondisi infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya memadai.

Kondisi geografis yang sulit seringkali menjadi hambatan dalam pemerataan akses pendidikan di daerah terpencil, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Donnelly dan Patrinos (2021) yang menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur transportasi merupakan salah satu faktor utama yang

menyebabkan kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Hasil wawancara dengan salah satu pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Majene menunjukkan bahwa faktor geografis masih menjadi kendala utama dalam pemerataan akses pendidikan.

“Wilayah Majene memiliki kondisi geografis yang cukup menantang. Di daerah pesisir akses pendidikan relatif mudah, tetapi di wilayah pegunungan jarak sekolah cukup jauh sehingga mempengaruhi tingkat kehadiran siswa.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Dasar, 2024).

Selain faktor geografis, faktor sosial ekonomi juga mempengaruhi akses pendidikan. Beberapa keluarga di wilayah pedesaan masih menghadapi keterbatasan ekonomi sehingga anak-anak mereka terpaksa membantu orang tua bekerja. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi keluarga memiliki pengaruh signifikan terhadap keberlanjutan pendidikan anak, terutama di wilayah pedesaan (Baird et al., 2022; World Bank, 2023). Seorang kepala sekolah di Kecamatan Ulumanda menjelaskan kondisi tersebut dalam wawancara penelitian.

“Sebagian siswa di desa masih harus membantu orang tua bekerja, terutama pada musim panen. Hal ini menyebabkan kehadiran siswa di sekolah tidak selalu stabil.” (Wawancara dengan Kepala Sekolah SD, 2024).

Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan akses pendidikan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui pembangunan sekolah, tetapi juga melalui kebijakan afirmatif seperti bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu serta penguatan infrastruktur transportasi pendidikan. Pendekatan kebijakan afirmatif ini juga direkomendasikan dalam berbagai studi internasional yang menekankan pentingnya intervensi kebijakan untuk meningkatkan akses pendidikan di wilayah terpencil (Leal Filho et al., 2022; UNESCO, 2023).

Mutu Pembelajaran dan Kualitas Tenaga Pendidik

Mutu pembelajaran merupakan aspek penting dalam pembangunan pendidikan berkelanjutan. Mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas pendidikan, tetapi juga oleh kualitas tenaga pendidik, proses pembelajaran, serta sistem pengawasan akademik. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kualitas guru merupakan salah satu faktor paling signifikan dalam meningkatkan hasil belajar siswa (OECD, 2020; Schleicher, 2023). Salah satu indikator penting dalam menilai mutu pendidikan adalah distribusi guru bersertifikat. Berdasarkan data penelitian, distribusi guru bersertifikat di Kabupaten Majene masih menunjukkan ketimpangan antar jenjang pendidikan. Persentase guru bersertifikat pada jenjang SMP mencapai sekitar 92 persen, sedangkan pada jenjang SD sekitar 67 persen, dan pada jenjang PAUD hanya sekitar 48 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas profesional guru pada pendidikan usia dini masih perlu ditingkatkan. Hal ini juga dikemukakan oleh salah satu pengawas sekolah yang menjadi informan penelitian.

“Kualitas guru sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Sekolah yang memiliki guru bersertifikat lebih banyak biasanya memiliki capaian pembelajaran yang lebih baik.” (Wawancara dengan Pengawas Sekolah Kabupaten Majene, 2024).

Selain distribusi guru bersertifikat, frekuensi supervisi akademik juga mempengaruhi mutu pembelajaran. Supervisi akademik merupakan proses pembinaan profesional yang dilakukan oleh pengawas sekolah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Data penelitian menunjukkan bahwa sekolah di wilayah pesisir memperoleh supervisi akademik sekitar empat hingga lima kali dalam satu tahun, sedangkan sekolah di wilayah pegunungan hanya memperoleh supervisi sekitar satu hingga dua kali dalam satu tahun. Perbedaan ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah pengawas sekolah serta kendala akses transportasi. Seorang guru di Kecamatan Tubo Sendana menjelaskan bahwa supervisi akademik sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

“Supervisi dari pengawas sekolah sangat membantu kami dalam memperbaiki metode pembelajaran. Namun karena jarak yang cukup jauh, supervisi di sekolah kami tidak terlalu sering dilakukan.” (Wawancara dengan Guru SMP, 2024).

Temuan ini sejalan dengan penelitian Schleicher (2023) yang menunjukkan bahwa penguatan sistem supervisi akademik dan pengembangan profesional guru merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

Infrastruktur Pendidikan dan Layanan Sekolah Ramah Anak

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah anak. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah Kabupaten Majene telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan. Data penelitian menunjukkan bahwa persentase ruang kelas layak di Kabupaten Majene meningkat dari 58 persen pada tahun 2022 menjadi 68 persen pada tahun 2025. Selain itu, akses internet di sekolah meningkat dari 40 persen menjadi sekitar 60 persen, sedangkan fasilitas sanitasi sekolah meningkat dari 55 persen menjadi sekitar 65 persen. Peningkatan infrastruktur pendidikan ini sejalan dengan temuan penelitian World Bank (2022) yang menunjukkan bahwa peningkatan fasilitas pendidikan, termasuk akses internet dan sanitasi sekolah, memiliki dampak positif terhadap kualitas pembelajaran dan kesejahteraan siswa. Meskipun demikian, peningkatan tersebut belum merata di seluruh wilayah. Sekolah di wilayah pegunungan masih menghadapi keterbatasan sarana pendidikan, terutama terkait akses internet dan fasilitas sanitasi. Seorang kepala sekolah di wilayah terpencil menjelaskan kondisi tersebut dalam wawancara penelitian.

“Kami masih menghadapi keterbatasan fasilitas, terutama akses internet. Hal ini cukup mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran berbasis digital.” (Wawancara dengan Kepala Sekolah SD Kecamatan Ulumanda, 2024).

Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Majene masih memerlukan perhatian khusus, terutama di wilayah dengan akses geografis yang sulit.

Integrasi Education for Sustainable Development (ESD)

Education for Sustainable Development (ESD) merupakan pendekatan pendidikan yang bertujuan membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Program ESD for 2030 yang dikembangkan UNESCO menekankan pentingnya integrasi nilai keberlanjutan dalam kurikulum pendidikan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan serta tanggung jawab sosial generasi muda (UNESCO, 2021). Implementasi ESD di Kabupaten Majene menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar, nilai-nilai keberlanjutan telah mulai diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran, seperti kegiatan menanam tanaman, pengelolaan sampah, serta pembelajaran berbasis lingkungan. Salah satu guru SD di Kecamatan Banggae menjelaskan bahwa kegiatan pembelajaran berbasis lingkungan memberikan dampak positif terhadap kesadaran siswa.

“Kami sering mengajak siswa melakukan kegiatan menanam pohon dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kegiatan ini membantu menanamkan nilai kepedulian lingkungan sejak dini.” (Wawancara dengan Guru SD, 2024).

Namun demikian implementasi ESD masih menghadapi beberapa kendala, terutama keterbatasan fasilitas pembelajaran serta akses internet di beberapa sekolah. Penelitian oleh Leal Filho et al. (2022) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi pendidikan berkelanjutan sangat bergantung pada dukungan infrastruktur pendidikan serta kapasitas guru dalam mengintegrasikan isu keberlanjutan ke dalam proses pembelajaran.

Analisis Implementasi Program Berdasarkan Model David C. Korten

Model implementasi program yang dikemukakan oleh David C. Korten (1980) menekankan pentingnya kesesuaian antara tiga elemen utama dalam implementasi program pembangunan, yaitu program (program design), organisasi pelaksana (*implementing organization*), dan kelompok sasaran (target group). Implementasi program akan berjalan efektif apabila terdapat keselarasan antara kebutuhan masyarakat dengan program yang dirancang, kapasitas organisasi pelaksana dengan tuntutan program, serta kesesuaian antara organisasi pelaksana dengan kondisi lingkungan sosial. Dalam penelitian ini, analisis implementasi pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan di Kabupaten Majene dianalisis berdasarkan ketiga dimensi tersebut.

1. Program People Fit

Dimensi Program People Fit menunjukkan tingkat kesesuaian antara program pendidikan yang dirancang pemerintah daerah dengan kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat. Program pendidikan di Kabupaten Majene diarahkan untuk meningkatkan akses pendidikan serta mengurangi angka putus sekolah melalui berbagai program seperti Program Indonesia Pintar (PIP), pembangunan sarana pendidikan, serta peningkatan layanan pendidikan dasar. Berdasarkan data pendidikan daerah, indikator akses pendidikan menunjukkan perkembangan yang relatif positif.

Tabel 1: Data Statistik Pendidikan Kabupaten Majene

No.	Tahun	APS 7-12 Tahun	APS 13-15 Tahun	APK SD	APK SMP
1.	2019	96,12%	90,45%	108,2%	95,6%
2.	2020	96,34%	91,02%	109,1%	96,4%
3.	2021	96,85%	91,75%	110,3%	97,2%
4.	2022	97,02%	92,11%	111,0%	97,8%
5.	2023	97,27%	92,56%	112,4%	98,1%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene, 2024

Data tersebut menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada jenjang pendidikan dasar relatif tinggi. APS usia 7-12 tahun berada di atas 96 persen, sementara APS usia 13-15 tahun berada di atas 90 persen. Hasil wawancara dengan salah satu pejabat Bappeda Kabupaten Majene menjelaskan bahwa program pendidikan yang dijalankan pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat.

“Program pendidikan yang dijalankan pemerintah daerah diarahkan untuk memastikan seluruh anak usia sekolah dapat mengakses pendidikan, terutama melalui bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu.” (Wawancara dengan Pejabat Bappeda Kabupaten Majene, 2024).

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kendala akses pendidikan di wilayah pegunungan.

“Di beberapa desa di wilayah pegunungan, jarak tempuh siswa menuju sekolah cukup jauh sehingga mempengaruhi kehadiran siswa.” (Wawancara dengan Kepala Sekolah SD Kecamatan Ulumanda, 2024).

Dengan demikian, pada dimensi Program People Fit, program pendidikan yang dilaksanakan pemerintah daerah secara umum telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meskipun masih diperlukan kebijakan tambahan untuk meningkatkan akses pendidikan di wilayah terpencil.

2. Program Organization Fit

Dimensi Program *Organization Fit* menunjukkan kesesuaian antara tuntutan program dengan kapasitas organisasi pelaksana. Dalam konteks implementasi program pendidikan di Kabupaten Majene, organisasi pelaksana utama adalah Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene. Kapasitas

organisasi pelaksana dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain jumlah tenaga pendidik, rasio guru terhadap siswa, serta jumlah pengawas sekolah.

Tabel 2: Data Rasio Guru dan Siswa Kabupaten Majene

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Guru	Jumlah Siswa	Rasio Guru : Siswa
1.	SD	1.245	15.120	1 : 12
2.	SMP	612	8.760	1 : 14
3.	SMA/SMK	498	7.320	1 : 15

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Majene, 2024

Secara umum rasio guru terhadap siswa di Kabupaten Majene masih berada dalam kategori yang cukup baik. Namun demikian, distribusi guru antar wilayah masih belum merata.

Hasil wawancara dengan salah satu pejabat Dinas Pendidikan menunjukkan bahwa distribusi guru masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan.

“Sekolah di wilayah kota relatif memiliki guru lebih banyak dibandingkan sekolah di wilayah terpencil. Hal ini menyebabkan ketimpangan kualitas pembelajaran.” (Wawancara dengan Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Majene, 2024).

Selain itu, jumlah pengawas sekolah juga masih terbatas dibandingkan dengan jumlah sekolah yang harus dibina.

Tabel 3: Data Pengawas Sekolah Kabupaten Majene

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Pengawas
1.	SD	135	8
2.	SMP	48	5
3.	SMA/SMK	32	4

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

Kondisi ini menyebabkan supervisi akademik tidak dapat dilakukan secara optimal.

“Jumlah pengawas sekolah masih terbatas sehingga tidak semua sekolah dapat memperoleh supervisi secara rutin.” (Wawancara dengan Pengawas Sekolah Kabupaten Majene, 2024).

Dengan demikian, pada dimensi Program Organization Fit, implementasi program pendidikan di Kabupaten Majene masih menghadapi tantangan terkait keterbatasan sumber daya manusia serta distribusi tenaga pendidik yang belum merata.

3. Organization Environment Fit

Dimensi *Organization Environment Fit* mengacu pada kesesuaian antara organisasi pelaksana dengan lingkungan eksternal tempat program dilaksanakan. Faktor lingkungan eksternal mencakup kondisi geografis wilayah, kondisi sosial masyarakat, serta dukungan pemangku kepentingan. Kabupaten Majene memiliki karakteristik wilayah yang terdiri dari daerah pesisir, dataran, dan pegunungan. Kondisi geografis ini mempengaruhi akses pendidikan serta distribusi fasilitas pendidikan.

Tabel 4: Data Jarak Tempuh Siswa ke Sekolah

No.	Kecamatan	Rata-rata Jarak Tempuh
1.	Banggae	0,8 km
2.	Banggae Timur	0,9 km

3.	Pamboang	1,7 km
4.	Sendana	2,3 km
5.	Tubo Sendana	3,9 km
6.	Ulumanda	5,1 km

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

Data tersebut menunjukkan bahwa wilayah pegunungan memiliki jarak tempuh yang jauh menuju sekolah. Hasil wawancara dengan salah satu guru menjelaskan bahwa kondisi geografis seringkali menjadi kendala dalam pelaksanaan pendidikan.

“Beberapa siswa harus berjalan cukup jauh untuk mencapai sekolah, terutama di wilayah pegunungan.” (Wawancara dengan Guru SD Kecamatan Tubo Sendana, 2024).

Selain faktor geografis, partisipasi masyarakat juga mempengaruhi keberhasilan implementasi program pendidikan.

“Dukungan masyarakat sangat penting dalam meningkatkan keberhasilan program pendidikan, terutama dalam mendorong anak-anak untuk tetap bersekolah.” (Wawancara dengan Kepala Desa Kecamatan Banggae, 2024).

Namun demikian bahwa di beberapa wilayah pedesaan masih terdapat tingkat kesadaran pendidikan yang relatif rendah.

“Sebagian orang tua masih menganggap bahwa bekerja lebih penting daripada melanjutkan pendidikan.” (Wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Kecamatan Ulumanda, 2024).

Dengan demikian, pada dimensi *Organization Environment Fit*, kondisi geografis wilayah serta tingkat kesadaran masyarakat menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program pendidikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis menggunakan model implementasi program dari David C. Korten, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi program pendidikan berkelanjutan di Kabupaten Majene ditentukan oleh tiga faktor utama. Pertama, pada dimensi program *people fit*, program telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan akses pendidikan, meskipun diperlukan kebijakan afirmatif untuk mengatasi hambatan geografis di wilayah terpencil. Kedua, pada dimensi program *organization fit*, efektivitas implementasi masih terkendala oleh distribusi tenaga pendidik yang tidak merata dan keterbatasan pengawas sekolah, sehingga penguatan kapasitas kelembagaan menjadi faktor krusial. Ketiga, pada dimensi program *environment fit*, kondisi geografis yang beragam dan tingkat partisipasi masyarakat secara signifikan memengaruhi pemerataan layanan pendidikan.

REFERENSI

- Baird, S., McIntosh, C., & Özler, B. (2022). The effects of cash transfers on education outcomes in developing countries. *World Bank Research Observer*, 37(2), 213-234.
- Balonier, S., & Huber, S. G. (2025). Governance of the implementation of education for sustainable development in schools. *Sustainability*, 17(2), 1-16.
- Bastida, E. L., et al. (2024). Creating a framework for sustainable research and extension engagements in education institutions. *ASEAN Journal of Community Engagement*, 8(1), 45-58.
- Brooks, C., et al. (2024). Education for sustainable development in global higher education. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 25(1), 1-17.
- Donnelly, R., & Patrinos, H. A. (2021). Learning loss during COVID-19: An early systematic review. *Prospects*, 51, 601-609.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

496

Indexed



SINTA 4



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 4 April 2026

- Duda, H. J. (2022). Environmental education and sustainable development in schools. *Journal of Environmental Education*, 53(3), 203-214.
- Gunawan, W. B. (2025). Revisiting Sustainable Development Goal 4: Quality education challenges in developing countries. *International Journal of Educational Development*, 102, 102914.
- Korten, D. C. (1980). Community Organization and Rural Development: A Learning Process Approach. *Public Administration Review*, 40(5), 480-511.
- Leal Filho, W., et al. (2022). Implementing sustainable development goals in education: A global review. *Sustainability*, 14(9), 5189.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- OECD. (2020). *Education at a Glance 2020: OECD Indicators*. OECD Publishing.
- OECD. (2022). *Education at a Glance 2022: OECD Indicators*. OECD Publishing.
- OECD. (2023). *Education Policy Outlook 2023*. OECD Publishing.
- Schleicher, A. (2023). *World class: How to build a 21st-century school system*. OECD Publishing.
- UNESCO. (2021). *Education for Sustainable Development: A Roadmap*. UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2023). *Global Education Monitoring Report 2023*. UNESCO Publishing.
- World Bank. (2022). *World Development Report 2022: Education and Learning Recovery*. World Bank.
- World Bank. (2023). *Learning Poverty Update Report*. World Bank.
- Widiastuti, I. (2025). Education inequality and regional development in Indonesia. *Journal of Education Policy*, 40(2), 145-160.
- Yanuarto, W. N., et al. (2025). Realizing sustainable development goal 4 through educational governance reforms. *International Journal of Educational Research*, 125, 102331.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

497

